



## PUTUSAN

Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**Wira Cahya Adwinata bin Sahabuddin**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, yang bertempat tinggal di Dusun Marga, RT. 002 RW. 003, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
m e l a w a n

**Hardianti binti Rahmad**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marga, RT. 002 RW. 003, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;



### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 14 November 2019, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0133/011/IX/2015, Tanggal 29 September 2015;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon Di Dusun Marga, RT. 002 RW. 003, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 3 Tahun, sampai Bulan Maret Tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Abid Aqira Pratama**, Tempat/Tanggal Lahir : Marga, 06 Nopember 2015.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Maret Tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon Pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya.
5. Bahwa sejak Awal bulan Maret Tahun 2018, berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 2 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Awal bulan Maret Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap Termohon;
3. Biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut Hukum yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 3 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0133/011/IX/2015, Tanggal 29 September 2015, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Sukarno bin Samsuddin**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai kakak sepupu Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - d. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal bulan Maret 2018 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui kabarnya;
  - e. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal hingga kini Termohon tidak pernah pulang kembali ke kediaman bersama berkumpul sebagai suami istri dan keduanya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui secara pasti;
2. **Sahabuddin bin Pasiung**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Desa Marga Karya,

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai ayah kandung Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- d. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal bulan Maret 2018 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui kabarnya;
- e. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal hingga kini Termohon tidak pernah pulang kembali ke kediaman bersama berkumpul sebagai suami istri dan keduanya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui secara pasti;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohannya, selanjutnya Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 5 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses sidang Termohon tidak pernah hadir di sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Termohon di sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya ”

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon dalam sidang, oleh karenanya berdasarkan dalil di atas, dan Pasal 149 RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah tercatat resmi secara Islam, dengan demikian secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Pemohon sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Pemohon agar supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 6 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah karena sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 4 permohonan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bertanda P, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dihadirkan sebagai saksi Pemohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **Sukarno bin Samsuddin**, sebagai saudara sepupu Pemohon dan **Sahabuddin bin Pasiung**, sebagai ayah kandung Pemohon, kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui tujuan kepergiannya dan hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah ada kabar darinya dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti, selanjutnya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon bahwasanya sejak awal bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan dalil-dalil pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menunjukkan ketetapan hatinya untuk talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci *Al-Qur'an* surat *Al Baqarah* Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِذَا زَعَمُوا أَنَّهُم طَلَّقُوا فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya: "Dan apabila kamu bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب

بالمصالح

Artinya : *"Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga keduanya telah pisah rumah, bahkan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar pertimbangan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun dari keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan di dalam sidang bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak awal bulan Maret tahun 2018, yang mana lamanya berpisah antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya salah satu alasan sebagai dasar perceraian adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah keduanya tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri, sudah cukup menjadi dasar yang dibenarkan secara hukum untuk bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan menceraikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon dan Majelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan menetapkan talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon dengan talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Wira Cahya Adwinata bin Sahabuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hardianti binti Rahmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Khairil, S.Ag.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **H. Husni Tamrin, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

**Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.EI, M.Si**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Khairil, S.Ag.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 11 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Husni Tamrin, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 270.000,00
4. Biaya PNBP Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

**J u m l a h Rp 386.000,00**

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;  
Sumbawa Besar, \_\_\_\_\_  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 12 dari 12 halaman